

Nasionalisme Papua Dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (Studi Kasus : Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta)

Restu Pamuji¹, David Efendi², Alam Mahadika³

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : mahadikaalam@gmail.com

Abstract

The Papuan Student Alliance (AMP) is a Papuan student organization that voices problems in Papua, especially politics. AMP has goals for Papuan independence which are contained in the organization's vision and platform. AMP itself is divided into seven committees in various cities, one of which is the Yogyakarta City Committee. The results of this study conclude that the Papuan nationalism that has developed within the Yogyakarta KK AMP is due to several reasons, among others; 1) Indonesia is considered a failure in carrying out nation-building in Papua; 2) Experience of violence experienced by the Papuan people; 3) The basic needs of the Papuan people are not fulfilled. Apart from the historical factor of Papua which has a strong connection with Papuan nationalism, the failure of nation-building by Indonesia in Papua is also a factor that makes Papuan nationalism continue to develop in the Yogyakarta KK AMP. In the construction of Papuan nationalism, the Yogyakarta KK AMP builds a shared identity through shared psychology regarding the oppression experienced by the Papuan people so far. The joint history that was formed by the AMP KK Yogyakarta is about Papua which has made efforts to become independent and then this independence was annexed by Indonesia. For the AMP KK Yogyakarta, the Papuan people have experienced violence (*memoria passionis*), land grabbing, exploitation of natural resources, discrimination, marginalization, and the crisis of freedom. Therefore, the common goal of AMP KK Yogyakarta is Papuan independence as an initial stage towards a better Papua.

Keywords: *Nationalism, Free West Papua, Alliance Student Papua*

Abstrak

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) adalah organisasi mahasiswa Papua yang menyoroti persoalan-persoalan yang ada di Papua khususnya politik. AMP memiliki tujuan untuk kemerdekaan Papua yang tertuang dalam visi dan platform organisasi tersebut. AMP sendiri terbagi menjadi tujuh komite tersebar di berbagai kota, salah satunya Komite Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nasionalisme Papua yang berkembang di dalam AMP KK Yogyakarta disebabkan karena beberapa hal antara lain ; 1) Indonesia dianggap gagal dalam melakukan pembangunan bangsa di Papua; 2) Pengalaman kekerasan yang dialami rakyat Papua; 3) Tidak dipenuhinya kebutuhan dasar rakyat Papua. Selain dari faktor sejarah Papua yang memiliki kaitan kuat dengan nasionalisme Papua, kegagalan pembangunan bangsa oleh Indonesia di Papua juga menjadi faktor yang membuat nasionalisme Papua terus berkembang di dalam AMP KK Yogyakarta. Dalam konstruksi nasionalisme Papua, AMP KK Yogyakarta membangun identitas bersama melalui psikologi bersama tentang ketertindasan yang dialami rakyat Papua selama ini.

Sejarah bersama yang dibentuk oleh AMP KK Yogyakarta adalah tentang Papua yang sudah melakukan usaha untuk merdeka kemudian kemerdekaan tersebut dianeksasi oleh Indonesia. Bagi AMP KK Yogyakarta rasa senasib sepenanggungan rakyat Papua adalah pengalaman akan kekerasan (*memoria passionis*), perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam, diskriminasi, marginalisasi, dan krisis kebebasan. Oleh karena itu tujuan bersama AMP KK Yogyakarta adalah kemerdekaan Papua sebagai tahap awal menuju Papua yang lebih baik.

Kata kunci: *Nasionalisme, Papua Merdeka, Aliansi Mahasiswa Papua*

Pendahuluan

Penelitian ini akan mencoba untuk melihat secara lebih jauh tumbuhnya nasionalisme jenis lain yaitu nasionalisme yang menghendaki pendirian suatu bangsa yang terbebas dari penindasan bangsa lain. Nasionalisme Papua tumbuh untuk melepaskan dirinya dari apa yang disebut kolonialisme Indonesia.

Nasionalisme Papua yang mengada karena berbagai realitas yang ada terkesan dikesampingkan. Nasionalisme Papua tidak diakui keberadaannya bahkan sering dianggap nasionalisme haram. Paling tidak hal ini dibuktikan dengan hadirnya kembali Nasionalisme yang berslogan “NKRI Harga Mati” yang mematikan nalar dan makna pembebasan. Sehingga hadirnya nasionalisme Papua menjadi musuh sejati bagi nasionalisme jenis ini tanpa melihat hal apa saja yang menumbuhkan nasionalisme Papua. Pembungkaman terhadap nasionalisme Papua oleh Indonesia masih terus dilakukan sampai saat ini dan entah sampai kapan.

Aditjondro mengatakan “Penggunaan cara pandang yang lebih netral untuk melihat faham kebangsaan yang hidup di Irian Barat, menurut hemat saya berarti melepaskan diri dari subjektivisme pandangan nasionalisme Indonesia yang menganggap Irian Barat merupakan bagian logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah jajahan Hindia Belanda” (Aditjondro, 1992). Benar apa yang dikatakan oleh George Junus Aditjondo bahwa kita sebagai bangsa dalam melihat nasionalisme haruslah obyektif, selama ini kita sebagai bangsa terlampau subyektif dalam melihat Nasionalisme. Hal itu dewasa ini dipahami sebagai suatu kemutlakan yang lahir dari langit sehingga nasionalisme lain yang tumbuh dianggap menyimpang. Seperti halnya nasionalisme Papua yang banyak dikutuk karena

monopoli nasionalisme NKRI harga mati seperti yang telah disebutkan di atas. Pada akhirnya glorifikasi nasionalisme “NKRI harga mati” kehilangan makna pembebasan dan kemanusiaan dari Nasionalisme. Nasionalisme semacam itu disebut Ben Anderson sebagai nasionalisme resmi yang digunakan negara untuk mempertahankan status quo dan dominasi terhadap rakyatnya.

Melihat hal tersebut di mana perjuangan rakyat Papua untuk membebaskan dirinya dan kondisi saat ini yaitu ketimpangan di Papua maka konsep nasionalisme apabila kita merujuk pada Ben Anderson maka Papua memiliki nasionalismenya sendiri. komunitas-komunitas terbayang yang mengandaikan dirinya sama juga dimiliki oleh Papua yang baru menyatakan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 terlebih bergabungnya mereka ke Indonesia dilakukan oleh Pepera yang kontroversial. Papua, dahulu Irian Barat, masuk ke Indonesia melalui referendum yang dinilai bermasalah oleh penduduk Papua dan oleh pihak-pihak luar, terutama yang menjadi saksi mata ketika pemungutan suara dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 (Drogveler, 2010).

Saat itu awal tahun 1960-an telah dipersiapkan lambang negara, bendera nasional, dan lagu kebangsaan Papua. Baru pada 1 Desember 1961 melalui bantuan pihak Belanda kemudian diproklamkan Negara Papua Barat. Dari sinilah bibit nasionalisme Papua mulai tumbuh dan mendapatkan tempat (Pigay, 2000). Nasionalisme Papua telah tumbuh dan mengada karena perjuangan panjang mereka untuk menjadi sebuah negara. Namun infiltrasi Indonesia yang puncaknya yaitu pepera 1969 yang kontroversial mengaburkan berdirinya negara Papua Barat.

Nasionalisme yang tumbuh sepanjang periode sejarah akan tetap ada di benak masyarakat Papua. Apalagi ketika kita melihat ketimpangan-ketimpangan sosial di Papua membuat kita berfikir kembali apa saja dosa yang telah dilakukan Indonesia kepada masyarakat Papua atas nama pembangunan. Ditinjau dari segi sejarah, tanggal 28 Juli 1965 merupakan awal dari gerakan-gerakan pro kemerdekaan Papua Barat yang dilabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Aditjondro, 1992). Melalui OPM inilah nasionalisme Papua mulai terlembaga dan memiliki gerakan politik. Meskipun dalam perkembangannya gerakan nasionalisme

Papua dan kemerdekaan Papua memiliki keberagaman, tetapi tuntutan dan tujuan mereka satu yaitu kemerdekaan dan terbebasnya dari belenggu penindasan.

Mahasiswa-mahasiswa Papua yang tergabung dalam organisasi bernama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) merupakan penerus dalam perjuangan pembebasan Papua. kini mereka menjadi pelopor lahirnya nasionalisme Papua yang lebih menarik. Nasionalisme yang dibawa oleh AMP menarik karena gerakannya berbeda dengan konstruksi nasionalisme Papua terdahulu. Menurut Aditjondro (1992) nasionalisme yang di perjuangkan oleh OPM terdahulu melalui serangkaian perjuangan bersenjata. sedangkan AMP dalam gerakan-gerakannya lebih menekankan gerakan mahasiswa yang sistematis. Organisasi yang kuat secara intelektual menjadi ciri khas AMP melalui diskusi-diskusi dan tulisan-tulisan anggotanya khususnya dalam menyoroti pembebasan nasional Papua

Penulis menyebut nasionalisme Papua yang lebih menarik juga karena AMP dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di kota yang ada di Indonesia. Sebagai gerakan anak muda AMP konsisten dalam menyoroti permasalahan-permasalahan yang ada di Papua. Tidak hanya menyoroti permasalahan Papua yang terjadi pada masa kini, akan tetapi AMP memiliki proyeksi untuk Papua yaitu pembebasan Nasional Papua Barat. Sebagaimana Sumpah pemuda yang dimotori oleh pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu dan di anggap sebagai munculnya nasionalisme, AMP pun melakukan hal yang hampir serupa. Secara konsisten AMP menuntut pembebasan nasional Papua Barat.

AMP sendiri memiliki beberapa cabang atau yang disebut komite, dari beberapa komite yang ada di Indonesia komite Kota Yogyakarta adalah komite yang gerakannya cukup masif. AMP komite Kota Yogyakarta konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. AMP awal terbentuk di Kota Yogyakarta dan AMP Komite Kota Yogyakarta menjadi pemula. AMP Komite Kota Yogyakarta konsisten dalam menuntut pembebasan Papua Barat. Salah satu bentuk konkrit penuntutan pembebasan Papua Barat yaitu aksi Pada tanggal 15 Juli 2016. Saat itu Aliansi Mahasiswa Papua yang tergabung dengan kelompok bernama Persatuan Rakyat

untuk Pembebasan Papua Barat akan melakukan aksi *long march* dari Asrama Papua Kamasan di Jalan Kusuma negara menuju titik Nol KM Yogyakarta. Aksi tersebut menyuarakan referendum untuk Papua dan dukungan bagi gerakan pembebasan Papua untuk menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) (CNN Indonesia, 2016). Demonstrasi yang dilakukan oleh AMP tersebut bukan merupakan yang pertama, Semenjak tahun 2013 AMP semakin aktif melakukan demonstrasi di kota-kota besar di Indonesia (CNN Indonesia, 2016).

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana Nasionalisme baru ini yang mulai tumbuh di dalam benak mahasiswa-mahasiswa Papua, khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi AMP Komite Kota Yogyakarta. Maka menjadi sungguh menarik bagaimana nasionalisme Papua dilihat melalui mahasiswa-mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua, lebih khusus AMP Komite Kota Yogyakarta).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui dialog atau wawancara maupun dari tulisan. Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta, dengan subjek penelitian yaitu Aliansi Mahasiswa Papua Komite Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Nasionalisme Papua dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta serta gerakannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta dan wawancara dengan mahasiswa Papua yang tidak tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Yogyakarta serta peneliti berusaha mengumpulkan sumber - sumber data yang berasal dari dokumen maupun media online lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data di dalam penelitian ini melewati tahapan yang pertama pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (Wawancara) dan observasi. Penelitian data yang telah didapatkan kemudian dikaji

dan dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data sekunder terkahir kesimpulan data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian di interpresentasikan lewat reduksi pada penelitian.

Analysis atau Hasil dan Pembahasan

Papua menjadi bagian dari Indonesia secara resmi setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat. Indonesia melakukan tindakan-tindakan represif guna menekan gerakan-gerakan yang pro kemerdekaan Papua. Papera sendiri dipertanyakan keabsahannya oleh sebagian rakyat Papua yang menganggap bahwa Papera tidak merepresentasikan rakyat Papua yang dikarenakan Papera menggunakan sistem perwakilan bukan satu orang satu suara.

Semenjak Papua diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963 sampai saat ini, persoalan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan terhadap orang Papua seakan tidak ada habisnya. Persoalan ini seperti mengkristal yang membuat penderitaan-penderitaan menimpa orang Papua. Mulai dari pelanggaran HAM, marjinalisasi, ketimpangan ekonomi menjerat tanah Papua dari tahun ke tahun. Pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dilakukan Indonesia melalui aparaturnya memunculkan gerakan-gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan yang paling awal menentang keberadaan Indonesia di tanah Papua yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Antara tahun 1964 dan 1998, OPM merupakan lambang perjuangan Papua untuk kemerdekaan dan menjadi kiblat identifikasi bagi sebagian besar pemimpin Papua dan elit Papua di pengasingan (Din, 2010). OPM menjadi simbol perlawanan Papua terhadap Indonesia dan menjadi anti-tesis yang mengatakan bahwa hadirnya Indonesia di Papua merupakan keluhuran Negara Indonesia.

Menurut (Aditjondro, 1993) yang mencoba menganalisis perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh aktor-aktor Papua. Dalam penelitiannya yang fokus pada kurun waktu 1965-1988, dia menemukan 5 evolusi dalam nasionalisme Papua. Pertama yaitu berdirinya OPM di Manokrawi yang menjadi simbol pertama gerakan melawan Indonesia dan tumbuhnya Papua. Tokoh pemimpinnya adalah

Johan Ariks, kedua yaitu setelah pemberontakan OPM berhasil dipadamkan oleh Pemerintah Indonesia, pada 1 Juli 1971 proklamasi OPM kedua teretus, pencetusnya adalah Seth Jafet Rumkorem seorang bekas Bintara yang di didik oleh Indonesia. Kekesalannya melihat pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan menejlang Papera membuat Rungkorem ikut bergabung dan begerilya dengan OPM. Ketiga pada 3 Desember 1974 para aktivis OPM mengimajinasikan negara merdeka yang mereka cita-citakan tidak hanya sebatas di Provinsi New Guinea Barat tetapi sampai Papua Nuigini. Mereka menyatakan merdeka 100% di luar Republik Indonesia. Keempat yaitu pada tanggal 26 April 1984, terjadi penembakan terhadap budayawan Arnold AP hingga akhirnya Arnold Ap di eksekusi karena dianggap menjadi penghubung OPM dengan simpatisan yang ada di kota. Selain itu, kelompok music membesak yang didirikannya dianggap membahayakan kedudukan NKRI di tanah Papua karena mengangkat kebudayaan-kebudayaan Papua dan membangkitkan nasionalisme Papua. Kelima, terdapat proklamasi dan pengibaran bendera OPM yang dilakukan oleh Tom Wanggai pada tanggal 14 Desember 1998. Pada saat itu dikibarkan bendera Melanesia Barat bukan Papua Barat.

Gerakan-gerakan sepanjang tahun 1965-1988 tersebut membuktikan adanya perlawanan terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia sekaligus mengindikasikan adanya suatu nasionalisme Papua yang masing-masing memiliki perbedaan cara pandang. Gerakan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan kepada Indonesia dan menghendaki adanya negara yang terlepas dari Indonesia. Mulai dari keganjilan sejarah, perlakuan sewenang-wenang kemudian merasa tidak terwakili dan Papera membuat gerakan-gerakan pro kemerdekaan muncul.

Kini di kota-kota besar di Jawa khususnya Yogyakarta terdapat organisasi mahasiswa yang konsisten menyerukan kemerdekaan Papua. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) konsisten dalam menyerukan kemerdekaan Papua. AMP fokus pada kajian-kajian memahami persoalan yang terjadi di Papua. Pada momen tertentu

AMP melakukan aksi demonstrasi menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Ketika gerakan-gerakan pro kemerdekaan terdahulu tampil melalui jalur militer dan kebudayaan, AMP tampil dengan kalangan muda terdidik dan melalui jalur yang bisa dikatakan lembut.

AMP Komite Kota Yogyakarta merupakan bagian integral dari AMP. Pada dasarnya apa yang membuat AMP KK Yogyakarta bergerak sejalan dengan pandangan AMP secara umum. Tidak ada membedakan antara AMP KK Yogyakarta dan AMP KK yang lain ataupun AMP Komite Pusat karena mereka dibentuk dalam satu kesatuan. Akan tetapi dalam berjalannya waktu AMP KK Yogyakarta juga memiliki cerita sendiri. Berkaitan dengan perlawanannya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Termasuk juga pandangan secara khusus dari AMP KK Yogyakarta dalam menyoroti persoalan Papua. Sepanjang perjalanan AMP KK Yogyakarta terdapat pasang surut organisasi. AMP KK Yogyakarta sendiri mulai aktif dan masif dalam aktivitas organisasi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 AMP KK Yogyakarta memiliki kenaikan dalam segi aktivitas organisasi maupun anggota.

Terdapat tiga persoalan utama yaitu sejarah Papua, hadirnya Indonesia di Papua, kemudian Perlawanan rakyat Papua. Permasalahan tersebut kemudian meruncing dan tidak kunjung selesai. Hadirnya kelompok-kelompok masyarakat serta mahasiswa Papua yang mengimajinasikan negara baru merupakan indikasi adanya persoalan kebangsaan. Kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan dan kemerdekaan Papua juga bervariasi. Hal ini menunjukkan masing-masing kelompok yang memiliki cara pandang atau pembacaan masalah sendiri-sendiri. Namun telah terlihat nasionalisme Papua yang tumbuh pada gerakan-gerakan tersebut. Secara khusus di sini akan membahas pembacaan persoalan nasionalisme Papua dari AMP KK Yogyakarta.

Pembangunan Bangsa oleh Indonesia di Papua

Pembangunan bangsa merupakan suatu hal yang unik di dalam negara. Pembangunan negara agaknya lebih mudah dibandingkan dengan pembangunan bangsa. Terdapat perbedaan antara pembangunan negara dan bangsa. Pembangunan bangsa adalah penciptaan sebuah komunitas yang terkait bersama oleh sejarah dan budaya serta di luar kemampuan kekuatan luar untuk mencapainya (Fakuyama, 2004). Artinya pembangunan bangsa memiliki titik bijak sejarah dan budaya sebagai hal yang utama. Penciptaan sebuah komunitas yang memiliki persamaan sejarah dan budaya tidak bisa di capai oleh kekuatan diluar dari komunitas. Ini yang membuat pembangunan bangsa lebih unik dibandingkan pembangunan negara.

Pembangunan bangsa sendiri melalui serangkaian proses asli yang terjadi di masyarakat, karena bangsa lebih dari sekedar pembayangan suatu komunitas. Penopang dalam proses pembangunan bangsa adalah pengalaman atas realitas dan pengalaman atas suatu realitas di mana hubungan-hubungan material antar orang dan pengalaman yang nyata mulai dari menempa bukan sekedar hubungan-hubungan material antar orang dan pengalaman yang nyata mulai menempa bukan sekedar hubungan-hubungan “yang dibayangkan”, melainkan hubungan-hubungan yang dialami secara aktual dialami karena ia material dan nyata (Lane, 2017). Dengan kata lain bangsa adalah suatu gambar yang lain dari pengalaman dan tafsirannya terhadap pengalaman itu (Lane, 2017).

Terdapat beberapa hal yang membuat gagalnya pembangunan bangsa oleh Indonesia di Papua. Kegagalan tersebut sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasca Konflik yang Tidak Pernah Selesai

Bagi Fakuyama (2004) tahap awal yang bisa dilakukan dalam pembangunan bangsa adalah memasukan pasukan keamanan, polisi, bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis. Bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah melakukan itu semua untuk melakukan pembangunan bangsa Papua. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah mereka telah melakukan itu semua dengan sesuai?. Sejarah Papua adalah

serangkaian kekerasan yang bertubi-tubi menimpa masyarakat. Indonesia melalui aparaturnegara menimpa masyarakat. Indonesia melalui aparaturnegara menindak masyarakat Papua yang dianggap seperatis dengan kekerasan bahkan tidak tanggung-tanggung sampai berujung pembunuhan.

Kekerasan menjadi semacam lingkaran setan yang menjerat Papua. Papua maka akan dihadapkan dengan serentetan kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Masyarakat Papua mengalami pengalaman yang sama yaitu kekerasan. Kekerasan itu kemudian menjadi ingtakan kolektif masyarakat Papua. Hal ini diperparah dengan represifitas dai pihak pemerintah kepada pihak pelanggaran kekerasan. Dengan demikian rangkaian peristiwa kekerasan yang berlangsung di tanah Papua hanya menjadi ingatan kolektif bangsa Papua di kampung - kampung dan di seluruh tanah, rawa, pesisir dan pegunungan (Suryawan, 2017). Pengalaman orang Papua terhadap serangkaian kekerasan yang menyejarah ini kemudian menjadi ingatan kolektif.

Pengalam kekerasan akan kerasa secara terus menerus membuat rakyat Papua merasa menjadi warga kelas dua dalam negara. Seperti yang dikatakan oleh Abbi Douw, ketua AMP KK Yogyakarta “Jadi semacam ada pandangan yang terbangun kalau orang Papua ingin merdeka maka haru dimusuhi. Stigma yang terbangun seperti itu, perlakuan kekerasan seperti ada terus menerus. Kekerasan menjadi faktor dominan yang membuat rakyat Papua pesimis dengan pemerintah Indonesia. Sejarah penderitaan akan kekerasan inilah yang membuat orang Papua merasa bukan orang Indonesia di beberapa persoalan.

2. Gagalnya Pemerintah Indonesia Dalam Menciptkan Stabilitas dan Lembaga yang Swadaya

Setelah upaya pembangunan pasca konflik, yang kedua bagaimana negara memastikan daerah tersebut dapat berintegritas dengan pemerintah . hal yang dilakukan tentunya membuat aturan dan membantu lembaga - lembaga tertentu. Pada konteks Papua sangat sulit untuk melihat tahapan - tahapan pada proses

pembangunan bangsa. Tahapan menciptakan lembaga swadaya seharusnya dilakukan setelah konflik dapat diredam. Namun fakta di lapangan adalah konflik terus berkecambuk tak terselesaikan apalagi pendekatan kekerasan lebih ditonjolkan oleh Indonesia sepanjang bangsa yang tidak terstruktur. Dalam arti hingga saat ini pembangunan bangsa tahap pertama bisa dikatakan gagal. Sehingga yang terjadi adalah pembangunan bangsa versi Fukuyama. Konsekuensi dari ke tidak aturan tersebut tentunya membuat tahapan yang kedua terkendala.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan lembaga yang swadaya dan dapat menopang keberlanjutan negara. Upaya tersebut di antara lain mengeluarkan Undang - undang Otonomi khusus. Di UU Otsus terdapat aturan untuk membentuk Majelis Rakyat Papua. MPR merupakan lembaga khusus yang ada di Papua dan merempresentasikan dari segi kultural masyarakat Papua. MPR ini di isi oleh orang asli Papua. Akan tetapi upaya tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Otsus yang di dalamnya memuat berbagai aturan sebenarnya sudah mengakomodir hal yang diperlukan demi kemajuan Papua. Akan tetapi penerapannya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan. Dana pembangunan puluhan triliun rupiah dalam skema Otonomi Khusus seakan tidak berdampak sama sekali dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat (Suryawan, 2017). Otsus sebenarnya merupakan antisipasi pemerintah dari permintaan merdeka rakyat Papua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Otsus merupakan muslihat yang dilakukan oleh Indonesia kepada Papua. Otsus adalah contoh bahwa negara memberikan perhatian kepada Papua tetapi Otsus yang sebenarnya bagus itu tidak dijalankan dengan baik (Wawancara, 2018).

3. Kebutuhan Dasar Masyarakat Papua Yang Tidak Terpenuhi

Secara garis besar ada tiga kebutuhan dasar masyarakat, ketiga hal tersebut adalah akses terhadap ekonomi, Pendidikan dan kesehatan. Dari ketiga kebutuhan itu adalah cerminan dari keberlangsungan hidup manusia secara jasmani dari ketiga

itu terpenuhi maka seseorang dapat dikatakan sejahtera. Sebenarnya ada satu faktor penting yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kebebasan, tetapi melihat realitas di Papua saat ini kebebasan menjadi hal yang masih jauh. Sudah di paparkan sebelumnya tindakan represif dari pemerintah untuk membungkam suara - suara kritis dari Papua. Tindakan kekerasan tersebut menunjukkan kebutuhan akan kebebasan masih terenggut oleh Negara.

Pada bidang ekonomi bisa dilihat geliat pembangunan dan industrialisasi yang masuk ke tanah Papua. Kota - kota Papua kini mulai banjir pembangunan dan menjelma menjadi kota - kota besar sektor ekonomi lebih dikuasai sebagian besar oleh pendatang daerah luar Papua (Suryawan, 2017). Pada ranah kesehatan Papua juga masih belum mendapatkan jaminan yang maksimal dari negara. Baru - baru ini di awal tahun 2018 ditemukan sejumlah kasus campak yang berujung pada kematian anak-anak di daerah Asmat. Pendataan empat tim terpadu penanggulangan campak dan gizi buruk mencatat sejak September lalu terdapat 524 korban akibat wabah campak dan gizi buruk. Enam puluh tujuh anak telah meninggal akibat campak dan gizi buruk ini. Satu lagi kebutuhan dasar yang wajib di beriakan oleh negara adalah pendidikan. Pendidikan di Papua seperti jalan di tempat, jika tidak ingin mengatakan terjadi kemunduran. Belum ada usaha serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Ketersediaan guru, buku pelajaran, dan gedung sekolah masih minim khususnya di pedalaman-pedalaman Papua.

Nasionalisme Papua dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta

Kaum muda terdidik selalu memiliki tempat tersendiri di dalam penyebaran nasionalisme. Pada konteks Papua terdapat Organisasi yang konsisten menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Papua. AMP memiliki beberapa komite di kota - kota besar salah satunya di Yogyakarta.

1. Identitas Bersama Yang Di Bentuk Oleh AMP KK Yogyakarta.

AMP KK Yogyakarta membentuk identitas bersama yang dilandaskan pada psikologi bersama. Psikologi bersama tersebut yaitu orang Papua dari mana saja merasakan nasib yang sama. Nasib yang sama merujuk pada kondisi di Papua saat ini di mana mereka tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk memilih masa depannya. Rakyat Papua masih dalam ketertinggalan ketika bangsa lain sudah merasakan kemajuan. Kondisi tersebut tidak akan berubah apabila Papua masih bergabung dengan Indonesia. Artinya bahwa AMP membentuk identitas bersama bahwa mereka mengalami ketertindasan di bawah kekuasaan Indonesia. Sekarang menurut AMP KK Yogyakarta pembangunan nasionalisme Papua masih dalam tahap pembangunan. Kini AMP KK Yogyakarta membentuk identitas melalui psikologi bersama. Mereka membangun psikologi bahwa rakyat Papua sampai saat ini tidak bisa menentukan nasibnya sendiri karena adanya Indonesia.

Menurut Anderson (2008) nasionalisme tumbuh melalui salah satu diantaranya adalah *print capitalism*. *Print Capitalism* yang berbentuk media cetak dan buku memiliki peran untuk membangun identitas bersama dan imajinasi sebagai sebuah bangsa. teori *print capitalism*, Anderson dalam perkembangan yang lebih maju mewujud di dalam media sosial. Media sosial juga menjadi sarana dalam membentuk identitas bersama yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta. di media sosial AMP memuat konten yang berisi pelanggaran-pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan kampanye kemerdekaan Papua.

2. Ideologi Tentang Sejarah Bersama

AMP KK Yogyakarta menafsirkan sejarah bersama Papua sebagai penggabung paksa Papua ke Indonesia. Sejarah menjadi pikiran bersama bahwa persoalan yang terjadi adalah penggabungan paksa ke Indonesia. Indonesia melakukan upaya - upaya mulai dari perundingan internasional sampai kekerasan secara fisik untuk menduduki Papua. Jadi setelah masa - masa banyak negara di tahun 1940 membebaskan diri dari kolonialisme, orang Papua waktu itu juga berusaha mendirikan negara (Wawancara, 2018). Saat itu pada tanggal 1 November 1961

direncanakan pengibaran bendera Bintang Kejora namun gagal. Akhirnya disetujui oleh pemerintah kerajaan Belanda 1 Desember 1961, Kominte Nasional Papua mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat di Hollandia (Alua, 2006). Ini yang menjadikan sejarah bersama rakyat Papua khususnya AMP KK Yogyakarta bahwa Papua sudah menjadi sebuah Negara. Seperti yang dikatakan anggota AMP KK Yogyakarta bahwa Papua diibaratkan sebelum masuk ke Indonesia adalah anak yang sudah lahir. Negara Papua sudah ada sebelum Indonesia masuk ke Papua (Wawancara, 2018).

3. Rasa Senasib Sepenanggungan

Rakyat Papua telah merasakan sejarah yang kelam di tanah kelahirannya. Bahkan peristiwa - peristiwa kelam tersebut sampai sekarang masih kerap terjadi. Pembunuhan, pelanggaran HAM, kekerasan, perampasan tanah, stigmatisasi adalah beberapa hal yang dirasakan oleh rakyat Papua. AMP KK Yogyakarta melihat perihal tersebut merupakan rasa senasib sepenanggungan yang dialami oleh seluruh rakyat Papua.

Kekerasan yang terus terjadi di Papua membuat pengalaman bersama ini abadi dan melewati lintas generasi. Dari awal bergabung dengan Indonesia hingga saat ini, kekerasan belum berhenti dan terus terjadi. Pengalaman bersama orang Papua terhadap kekerasan politik menumbuhkan ingatan kolektif tentang penderitaan atau disebut "memoria passionis". Pengalaman kekerasan telah mengakibatkan trauma psikologis di kalangan orang Papua, khususnya bagi mereka yang menjadi korban secara langsung dari pendekatan militer di Papua (Widjoyo, 2009).

Perasaan akan penderitaan yang terjadi di Papua mulai dari perampasan lahan, pembunuhan, pelanggaran HAM, stigma, krisis kebebasan kemudian di analisis oleh AMP KK Yogyakarta. AMP mencoba melihat sejarah persoalan yang membuat penderitaan terus terjadi di Papua. Ada kolonialisme yang sedang terjadi di Papua berhubung erat dengan kekuasaan Indonesia di Papua. Bangsa Papua kini sedang

dalam kolonialisme Indonesia dan rasa sebagai bangsa koloni yang berakibatkan pada penderitaan – penderitaan di Papua ditanggung oleh seluruh rakyat Papua.

4. Tujuan Bersama AMP KK Yogyakarta

Dalam platformnya AMP secara gamblang menyatakan melawan neo – kolonialisme Indonesia, imperialisme global dan militerisme Indonesia. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Indonesia hadir di tanah Papua melalui militer yang melakukan serangkaian kekerasan. Selain itu bergabungnya Papua ke Indonesia juga melalui campur tangan negara – negara lain dan perundingan internasional. Seperti Platformnya AMP yaitu “Melawan Neo – Kolonialisme Indonesia, Melawan Neo – liberalisme/Imperialisme Ekonomi Gobar dan Melawan Militerisme Indonesia” (AMP, 2013).

AMP mencoba mencari akar permasalahan yang terjadi di Papua yang mengakibatkan penderitaan – penderitaan kepada rakyat Papua selama ini. Dari situ AMP melihat bahwa permasalahan terjadi di Papua berhubungan dengan sejarah Papua. Sejarah Papua tersebut mulai dari kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda di Papua sampai pada saat ini hadir Indonesia di Papua. Dari persoalan – persoalan tersebut kemudian AMP melihat bahwa akar permasalahan Papua berhubungan dengan kekuasaan Indonesia di Papua. Ada kolonialisme di tanah Papua yang sekarang ini sedang dilakukan di Indonesia. Douw mengatakan bahwa dari situ AMP melihat berbagai persoalan mulai dari perampasan – perampasan punya hubungan erat dengan kekuasaan Indonesia di Papua. AMP berjuang untuk menyelesaikan persoalan – persoalan yang ada di Papua. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka harus di cabut dari akar permasalahan yaitu kekuasaan Indonesia. Jika ingin menyudahi penderitaan – penderitaan yang tidak manusiawi maka tahap awal bagi rakyat Papua adalah melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia. Kemerdekaan Papua akan mengantarkan Papua selangkah lebih maju untuk menyudahi penderitaan yang sekian lama dialami.

Sekalipun kemerdekaan bagi Papua telah diraih, AMP terus berjuang untuk Papua yang lebih baik. Hal – hal yang akan tetap diperjuangkan AMP setelah

kemerdekaan tercapai yaitu membangun suatu tatanan masyarakat baru yang dekomratis secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, partisipatif budaya. menurut AMP proses pembangunan bangsa dilakukan secara terus menerus. Hal itu dikarenakan persoalan kebangsaan yang tidak akan pernah selesai. Persoalan kebangsaan akan terus menerus terjadi seiring dengan adanya pertentangan kelas di kehidupan, persoalan kebangsaan akan selesai ketika persoalan kelas juga sudah selesai. Artinya terhadap masyarakat berkelas dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Menurut Niwandhono (2011) dalam mewujudkan gerakan nasionalisme terbagi dua varian. Varian yang pertama yaitu gerakan elit dan kedua gerakan populis. Untuk konteks AMP KK Yogyakarta, gerakan mereka merupakan kombinasi dari gerakan elitis dan gerakan populis. AMP KK Yogyakarta melakukan perkaderan dalam bentuk pendidikan tertutup dan pendidikan terbuka.

Wacana dan Praktik Demokrasi

Dalam menjamin pemerintah berperilaku demokratis menurut Dahl (1999) rakyat harus diberi kesempatan untuk : Pertama merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri : kedua memberitahukan perihal preferensinya kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif : ketiga mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.

Wacana demokrasi yang dirumuskan oleh Dahl (1999) justru berkebalikan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Lebih khusus hubungan antara AMP KK Yogyakarta dengan negara. Tidak ada jaminan bagi AMP KK Yogyakarta untuk merumuskan preferensinya sendiri. AMP dibentuk pada saat negara Indonesia sedang dalam proses demokratisasi. Indonesia yang sedang menuju arah demokrasi membuat organisasi AMP bisa eksis di Indonesia. Namun bukan berarti berdirinya AMP di era demokrasi ini berarti negara sudah memberikan jaminan kepada AMP.

Selama ini tidak ada jaminan dari negara dalam memberikan hak bersuara untuk AMP. Tuntunan dan kepentingan AMP untuk kemerdekaan Papua membuat negara tidak memberikan jaminan kepada organisasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Douw “Tuntunan ini memang strong”. Tidak ada jaminan hak dari negara untuk AMP bersuara (Wawancara, 2018). Apa yang dikatakan oleh Douw tercermin saat AMP KK Yogyakarta melakukan aksi kemudian di hadang oleh kepolisian dan organisasi masyarakat (Ormas) di Yogyakarta. AMP KK Yogyakarta kerap melakukan aksi menuntut kemerdekaan Papua di hari - hari tertentu yang berhubung dengan sejarah Papua, contohnya pada tanggal 1 Desember. Pembungkam terhadap AMP khususnya AMP KK Yogyakarta yang paling parah terjadi pada tanggal 15 Juli 2016. Pada saat itu AMP KK Yogyakarta akan melakukan aksi namun dihadang oleh aparat dan ormas sehingga menyebabkan mereka terkurung disana.

Ada dua cara yang dilakukan AMP KK Yogyakarta dalam memberitahukan preferensinya terhadap masyarakat dan pemerintah. cara tersebut terasuk dalam upaya kolektif dan upaya individual anggota AMP KK Yogyakarta. Pemberitahuan preferensi secara kolektif kepada pemerintah dan masyarakat secara luas yaitu melalui aksi - aksi massa yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta. Pemberitahuan preferensi secara kolektif juga dilakukan dengan kampanye di media massa dan media sosial AMP. Sedangkan aksi - aksi individua lebih menekankan kepada tulisan - tulisan anggota AMP di media sosial setiap individu anggota.

Dalam memperjuangkan kepentingan kepada pemerintah, AMP sering menggunakan aksi - aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut pemerintah supaya Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri. AMP menginginkan dilakukan referendum untuk kemerdekaan Papua. Aksi dilakukan disetiap kota dimana kota tersebut terdapat organisasi AMP. Namun di Yogyakarta sendiri, AMP KK Yogyakarta tidak bisa melakukan aksi seperti dulu karena krisis kebebasan semakin menguat. Aksi yang batal dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 menandai dimulainya krisis kebebasan terhadap mahasiswa Papua di DIY.

Kondisi di Yogyakarta memberikan tantangan tersendiri bagi AMP KK Yogyakarta. AMP KK Yogyakarta berada di dalam sebuah wilayah yang masyarakatnya yang pro terhadap negara. Sehingga narasi yang berlawanan dengan narasi resmi negara biasanya diintimidasi oleh sekelompok masyarakat jenis pro negara. Oleh karena itu saat AMP KK Yogyakarta melakukan aksi - aksinya kemudahan dihadapkan dengan sekelompok masyarakat yang pro terhadap negara yang tidak jarang bertindak fasis.

AMP KK Yogyakarta yang Melampaui Politik Identitas

Menurut Haboddin (2012) terdapat tiga kecenderungan dalam politik identitas. Pertama ingin mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar - dasar hak sebagai manusia baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. kedua demi menjaga melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok bersangkutan. Ketiga kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

1. Usaha Dari AMP KK Yogyakarta untuk mendapatkan perlakuan yang sama

Indonesia sebagai negara selama ini dianggap telah melakukan tindakan yang berbeda berupa diskriminasi yang dilakukan oleh negara selama ini terjadi di Papua . Douw mengatakan di dalam masyarakat terdapat perlakuan yang berbeda dari negara. Salah satu contoh diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada rakyat Papua adalah stigmatisasi Rakyat Papua di stigma memiliki aspirasi untuk merdeka sehingga layak untuk di musuhi dan di represi. Wcana yang terbangun di dalam aparaturnegara khususnya militer adalah rakyat Papua sebagai separatis sehingga harus ditekan melalui pendekatan keamanan secara terus menerus.

Atas dasar tersebut AMP KK tersebut AMP KK Yogyakarta berjuang agar rakyat Papua mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mereka mengupayakan dihenditkan kekerasan di Papua dan menuntut negara untuk mengusut pelanggaran - pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di tanah Papua. Perlakuan

yang selama ini dilakukan negara kepada rakyat Papua membuat mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. AMP KK Yogyakarta menuntut agar diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

2. Selektif Dalam Melestarikan Budaya dan Upaya Menciptakan Budaya Baru

Papua memiliki budaya yang masih kental terdapat suku - suku yang masih memegang tinggi warisan leluhur. Setidaknya terhadap sebelas suku besar yang ada di Papua. Suku - suku tersebut adalah Biak, Amugme (Timika), Serui (Yapen Waropen), Dani (Wamena), Sentani (Jayapura), Marind (Marauke), Me (Paniai), Moni (Paniai), Asmat (Agast), Ayamaru (Sorong), dan Komoro (Timika) (Widjoyo, 2009). Setiap suku memiliki aturan khas masing - masing sakral.

Pembangunan di Papua yang membawa kebudayaan baru yang menegaskan budaya dan aspek lokal mengakibatkan orang Papua mengalami marginalisasi. Marginalisasi tersebut berakar pada perbedaan pemahaman yang mendasar antara orang Papua dan Pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan sejarah orang Papua itu sendiri dan pembangunan (Suryawan, 2017). Douw mengatakan mereka yang masih bergantung dengan alam dengan masuknya industrialisasi itu sebenarnya kebudayaan Papua belum sampai kesana. Ada benturan kebudayaan yang terjadi di Papua. Lebih jauh Douw mengatakan dengan adanya benturan kebudayaan yang terjadi di Papua. Dengan adanya kebudayaan baru yang masuk membuat kebudayaan lama tergeser, lalu kebudayaan yang lama kalah. Posisi kekalahan budaya ini membuat orang Papua semakin tersingkir (Wawancara, 2018).

Namun, AMP KK Yogyakarta mempunyai perspektif lain dalam ranah kebudayaan. Mereka tidak serta merta menganggap bahwa kebudayaan lama otomatis harus dipertahankan. Kebudayaan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Karena manusia sendiri adalah subyek kebudayaan, mereka yang menciptakan sebuah kebudayaan. Bagi AMP KK Yogyakarta budaya lama yang baik

harus dipertahankan sedangkan budaya lama yang buruk harus ditinggalkan untuk membangun budaya baru yang lebih baik. Apa yang sedang diperjuangkan oleh AMP KK Yogyakarta dengan membangun kebudayaan baru adalah paham kebudayaan yang melampaui paham kulturalisme. Paham kulturalisme adalah sebuah pendapat bahwa individual ditentukan oleh budayanya, sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup, sehingga individual tidak dapat meninggalkan dirinya di dalam budayanya (Suryawan, 2017).

Kecenderungan terakhir yang ada di dalam politik Identitas menurut Haboddin (2012) adalah kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. AMP KK Yogyakarta menolak etnis sebagai salah satu landasan untuk berjuang. Selama ini mereka tidak menjadikan etnis sebagai salah satu alasan perjuangan. Seperti yang dikatakan Douw “Kalau AMP sendiri soal etnis tidak menjadi perjuangan AMP. Struktur kekuasaan menjadi alasan AMP untuk berjuang di bidang mempermasalahkan antara Indonesia dan Papua dari segi etnisitas. Kekuasaan yang menindas ter manifestasikan dalam bentuk kebijakan – kebijakan yang melengserkan rakyat Papua.

Kesimpulan

AMP menetapkan fokus perjuangannya pada kemerdekaan Papua. Fokus perjuangan tersebut diterapkan pada seluruh komite – komite AMP tersebut AMP Komite Kota Yogyakarta yang merupakan bagian integral dari AMP. Perjuangan AMP untuk kemerdekaan Papua menandakan nasionalisme Papua yang mengada dan tumbuh di dalam AMP. AMP menempatkan posisinya sebagai yang liyan dari Indonesia.

Tumbuhnya paham kebangsaan Papua (Nasionalisme Papua) yang merupakan antitesis dari kebangsaan Indonesia adalah efek dari realitas politik yang terjadi di Papua. Kegagalan pembangunan bangsa oleh Indonesia mengakibatkan tumbuhnya paham kebangsaan lain yaitu paham kebangsaan Papua. Pendekatan dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnya militer Indonesia selama

Jurnal Dinamika

Volume 1 No. 2 (2020)

E-ISSN: 2723-1410

Website: <https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/dinamika/index>

kurun waktu yang Panjang membentuk ingatan kolektif rakyat Papua akan kekerasan dan penderitaan.

Bagi AMP KK Yogyakarta, selama Papua masih bergabung dengan Indonesia maka permasalahan - permasalahan mendasar tersebut tidak akan pernah selesai, jalan satu - satunya untuk Papua yang lebih baik adalah kemerdekaan Papua. Papua yang bebas menentukan nasibnya sendiri, mandiri, dan terbebas dari kolonialisme Indonesia.

Rerefensi

Aditjondro, G. J. (1992). *Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam. Seminar tentang Nasionalisme di Universitas Kristen Satya Wacana*. 1992.

Aditjondro, G. J. (1993). *Bintang Kejora di tengah kegelapan Malam. Seminar tentang Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Aliansi Mahasiswa Papua. (2013, November). *Tentang Kami : Aliansi Mahasiswa Papua*. Dipetik Januari 21, 2018, dari ampmalangraya.blogspot.co.id: <http://ampmalangraya.blogspot.co.id/2013/11/tentang-kami-aliansi-mahasiswa-papua-amp.html>

Alua, A. A. (2006). *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan*. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

Anderson, B. (2008). *Imagined Communities*. Yogyakarta: INSIST.

CNN Indonesia. (2016). <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809081824-20-150076/aliansi-mahasiswa-papua-gerakan-yang-kian-garang/>,.

- Dahl, R. (1999). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Dalam M. Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (hal. 11). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drogveler, J. (2010). *Tindakan Pilihan Bebas; Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fukuyama, F. (2004). *Memperkuat Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 119.
- Lane, M. (2017). *INDONESIA TIDAK HADIR DI BUMI MANUSIA*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Pigay, D. N. (2000). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryawan, I. N. (2017). *Papua Versus Papua*. Yogyakarta: Labirin.
- Suryawan, I. N. (2017). *Suara-Suara Yang Dicapangkan*. Yogyakarta: BASABASI.
- Widjoyo dkk, M. (2009). *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia.